

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Biro Hukum provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, 2023

KEPALA BIRO HUKUM



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO HUKUM	1
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIRO HUKUM	2
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	16
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	16
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	19
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	20
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

DATA/INFORMASI UMUM
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN BIRO HUKUM

I. PENDAHULUAN

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Biro Hukum mempunyai tugas untuk penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
2. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BIRO HUKUM

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.023.639.142,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.450.073.356,- atau 81.03% dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk Hukum Yang Ditetapkan	Perda : 10 Pergub : 60 Kepgub : 750 Draft/ rancangan produk hukum daerah kab/kota yang difasilitasi: 60 Ranperda kab/kota yang dievaluasi : 20 Perda kab/kota yang diklarifikasi : 3 Pert KDH &	Perda : 7 Pergub : 39 Kepgub: 1083 Draft/ rancangan produk hukum daerah kab/kota yang difasilitasi : 136 Ranperda kab/kota yang dievaluasi : 25 Perda kab/kota yang diklarifikasi : - Pert KDH &	93.13% 97.92%

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
			DPRD kab/kota yang diklarifikasi: 5	DPRD kab/kota yang diklarifikasi : 2	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus Yang Ditangani	Perkara : 10	Perkara : 24	240%
		Jumlah Bantuan Advokasi Hukum Yang Ditetapkan	Bantuan advokasi : 5	Bantuan advokasi : 5	100%
		Jumlah unit kerja, kab/kota yang memenuhi indikator RANHAM	Unit kerja provinsi : 7 Kab/kota : 19	Unit kerja provinsi : 7 Kab/kota : 19	100%
II	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB (70.80%)

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
5. Kolom 4: Diisi dengan Realisasi Target Kinerja;
6. Kolom 5: Diisi dengan Persentase antara Target kinerja dengan realisasi.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah						

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90%	100%	100%	39.344.940	39.130.200	99.45%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan	12 bulan	100%	70.615.200	70.606.200	99.99%
3.	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		12 bulan	12 bulan	100%	11.950.200	11.375.570	95.19%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	79.171.000	61.794.070	78.05%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	12 bulan	100%	486.971.990	463.788.223	95.24%
6.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	195.404.480	178.417.300	91.31%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	12 bulan	100%	2.296.000	2.179.483	94.93%
8.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan		100%	100%	100%	93.390.000	61.608.300	65.97%

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintah Daerah							
II	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah						
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		90%	100%	95.53%	1.249.005.690	1.131.429.313	90.59%
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum		90%	100%	100%	795.489.642	429.744.697	54.02%

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target dalam dokumen anggaran;
5. Kolom 5: Diisi dengan Realisasi Target dalam dokumen anggaran;
6. Kolom 6: Diisi dengan Persentase antara Target dengan realisasi.
7. Kolom 7 : Diisi dengan Alokasi Anggaran
8. Kolom 8 : Diisi dengan Realisasi Anggaran
9. Kolom 9 : Diisi dengan Persentase Realisasi

Tabel 2.3

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3.	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah			
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
II.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
1.	Fasilitasi Penyusunan	Masih adanya produk hukum	Inventarisir produk hukum	

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
	Perundang-undangan	daerah yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru beserta pendanaannya yang masih terbatas	daerah yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Mengadakan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan lingkup provinsi, dan kab/kota	
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah Sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah	Mengupayakan akses dan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat dan pemerintah Mengadakan sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
 2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
 3. Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
 4. Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
 5. Kolom 4: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022;
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dicapai dengan dukungan kegiatan :
 1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan output kegiatan sbb: 7 Perda, 39 Peraturan Gubernur, 1059 Keputusan Gubernur.

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Peraturan Daerah	10	7	70%
2.	Peraturan Gubernur	60	39	65%
3.	Keputusan Gubernur	750	1083	144.4%

2. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota, dengan output kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota	60	136	226%
2.	Ranperda kab/kota	20	25	125%
3.	Perda kab/kota	3	0	0
4.	Peraturan KDH & DPRD kab/kota	5	2	40%

3. Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan output kegiatan ini :

Tersalurkannya bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebanyak 5 bantuan, dapat terealisasi sebanyak 5 bantuan yang berasal dari 3 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Kantor Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU).

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 yang merupakan RANHAM Generasi V berfokus dan berorientasi pada pemenuhan (4) empat sasaran kelompok, yaitu : Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat. Sebagai sebuah dokumen teknokratik dan amanat Presiden Indonesia, RANHAM harus dilaksanakan disemua jenjang pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Maka untuk itu perlu dilakukan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai sarana bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam pelaksanaan kegiatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Kegiatan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai sarana bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 1945 pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas, maka dilakukan Koordinasi tindak lanjut pelaksanaan RANHAM ke Ditjen Hak Asasai Manusia di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

**REKAPITULASI PENANGANAN
PERKARA LITIGASI
PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**

PERKARA TATA USAHA NEGARA

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Perkara TUN No. 39/G/2021/PTUN.PDG	Herman Sofyan, S.E	Gubernur Sumatera Barat	1. Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171- 730-2021 tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021; 2. Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171- 731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021.	Dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung tanggal 29 Juli 2022	Kasasi	

PERKARA PERDATA

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Perkara No.566/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim (PN. Jakarta Timur)	Sunanto Santoso	- Kepala Kantor Penghubung (Tergugat I) - Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Perbuatan Wanprestasi (Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar / Hotel Balairung)	Dalam Proses Peninjauan Kembali	Peninjauan Kembali (PK) Oleh Penggugat	
2.	Perkara No. 15/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Padang)	Armen	Kadis PUPR Provinsi Sumatera Barat (Turut Tergugat D)	Perbuatan Melawan Hukum (Perampasan dan penguasaan serta pengolahan secara sepihak tanah objek perkara oleh Tergugat)	Inkracht dengan Putusan PN Pariaman tanggal 27 Januari 2022	-	Amar Putusan : Dalam Eksepsi : - Menerima Eksepsi Tergugat A, B, c dan Turut Tergugat D Dalam Pokok Perkara :

							<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.268.000,-
3.	Perkara No. 39/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Sahar, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Ladang Laweh, Nagari Sicincin, Kec.2x11 Enam Lingkung, Kab.Padang Pariaman)	Dalam Proses Kasasi	Kasasi	Perkara Jalan Tol
4.	Perkara No. 40/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Jamalis Buyung Tupai, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Desa Kasang Barat Utara, Kec. Batang Anai, Kab.Padang Pariaman)	Inkracht dengan Putusan Banding tanggal 14 Sept 2022	Banding	Perkara Jalan Tol

5.	Perkara No.41/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Zulbahri, SH	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 11)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Gelapung, Nagari Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman))	Inkracht dengan Putusan Banding tanggl 5 Oktober 2022	Banding	Perkara Jalan Tol
6.	Perkara No.68/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Masrizal	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 7)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Gelapung, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman seluas ± 1.500 M2)	Inkracht dengan Putusan Sela tanggal 6 April 2022		Perkara Jalan Tol Putusan Sela tanggal 6 April 2022. Amar Putusan Sela : Mengadili : Mengabulan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat 7; menyatakan pengadilan Negeri Pariaman Tidak Berwenang mengadili perkara ini ; menghukum Penggugat membayar biaya

							perkara sejumlah Rp. 6.067.000,-
7.	Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN.BSK (PN. Batusangkar)	Anas Adam	- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Tergugat IV) - Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan Tanah atas bangunan SMAN I Rambatan Kab. Tanah Datar)	Inkracht		Putusan tanggal 18 April 2022 yang memenangkan Tergugat
8.	Perkara No.78/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman)	Anton, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat H)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah yang terletak di Korong Gunung Kanter, Kanagarian Sumgai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, dengan luas ± 3.200 M ²)	Dalam Proses Banding	Banding	Perkara Jalan Tol
9.	Perkara		Gubernur Sumatera Barat	Perbuatan melawan Hukum (Kepemilikan HGU atas PT.	Inkracht		Gugatan dicabut

	No.10/Pdt.G/2021/PN.Plj (PN. Pulau Punjung)	Burhanudin Ninik Saga Jantan, dkk	(Turut Tergugat III)	Tidar Kerinci Agung)			4 Juli 2022
10.	Perkara No.3/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Sakirman Akir, dkk (Penggugat)	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 10).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah yang terletak Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kab, Padang Pariaman)	Inkracht dengan Putusan Sela tanggal 2 Juni 2022		<p>Perkara Jalan Tol</p> <p>Putusan Sela tgl 2 Juni 2022</p> <p>Amar Putusan Sela :</p> <p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulan Eksepsi Tergugat 7, 2. Menyatakan pengadilan Negeri Pariaman Tidak Berwenang mengadili perkara ini. 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.005.000,-

11.	Perkara No.10/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Zainal AR, dkk (Penggugat)	Dinas PUPR Prov. Sumatera Barat (Tergugat IX).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah Yang terletak di Surantih, Kayu Gadang, Koto Buruk dan Surantih Parak Pisang Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dengan luas ± 30 Ha)	Dalam Proses Persidangan		
12	Perkara No.12/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Nusirwan Abu dkk (Penggugat)	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat F).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah yang terletak di Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kec, 2 x 11 Enam Lingkung, Kab. Padang)	Dalam Proses Persidangan		Perkara Jalan Tol
13.	Perkara No.19/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Masrizal	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 5).	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Gelapung, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman seluas ± 1.500 M2)	Dalam Proses Persidangan		Perkara Jalan Tol

14.	Perkara No.85/Pdt.G/2022/PN.PDG (PN. Padang)	CV. Tiga Arjuna	1. Kepala Dinas Perindag (Tergugat 1) 2. Syafrizal, SE.MM Sekretaris Dinas Perindag / Tergugat 2) 3. Pokja XIII	Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengadaan Mesin Jahit melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Dalam Proses Persidangan		
15.	Perkara No.20/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Dasril	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 3)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Gelampung, Nagari Pasia Laweh, Kec. Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman seluas ± 10.060 M2)	Dalam Proses Persidangan		Perkara Jalan Tol
16.	Perkara No.21/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	P i l i	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat D)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Padang Galundi, Korong Bari, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman seluas ± 2.460 M2)	Dalam Proses Persidangan		Perkara Jalan Tol
17	Perkara	Syamsuar gelar	Gubernur Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait	Dalam Proses		Perkara Jalan

	No.29/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Datuak Rajo Nando, dkk	(Turut Tergugat 5)	Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Binu, Bari Sicincin Kab.Padang Pariaman seluas ± 2 Ha)	Persidangan		Tol
18	Perkara No.34/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Johan Widjaja	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 2)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kab.Padang Pariaman seluas ± 34.400 M2)	Dalam Proses Persidangan		Perkara Jalan Tol
19.	Perkara No.148/Pdt.G/2022/PN.PDG (PN. Padang)	Togi P. Tobing, dkk	- Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 2) - Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Prov. Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum (Mekanisme dan Tata Cara Penjaringan calon Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 -2025)	Dalam Proses Persidangan		
20.	Perkara No.45/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	M. Tadjji, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang	Dalam Proses Persidangan		Perkara Jalan Tol

			5)	berlokasi di Padang Toboh, Nagari Parit Malintang Kab. Padang Pariaman seluas ± 26.000 M2)			
21.	Perkara No.57/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Bakaruddin	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman seluas ± 12.000 M2)	Dalam Proses Persidangan		Perkara Jalan Tol
22.	Perkara No.66/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Syahrial	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 1)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman seluas ± 29.000 M2)	Dalam Proses Persidangan (Tahap Mediasi)		Perkara Jalan Tol
23.	Perkara No.67/Pdt.G/2022/PN.PMN (PN. Pariaman)	Afrizal	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 10)	Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung	Dalam Proses Persidangan (Tahap Mediasi)		Perkara Jalan Tol

			Kab. Padang Pariaman)			
--	--	--	------------------------	--	--	--

- b. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan dukungan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Daerah
 3. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Biro Hukum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Biro Hukum Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1			
TIDAK ADA			
2	Dst		

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Biro Hukum telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Berkaitan dengan masih belum dikeluarkannya beberapa Peraturan Gubernur yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah. Fraksi PKS meminta agar OPD terkait segera menyelesaikannya sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat segera diaplikasikan di lapangan	Biro Hukum akan segera melakukan koordinasi dengan OPD pemrakarsa untuk menindaklanjuti amanat untuk membentuk peraturan pelaksanaan sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD
Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Berkaitan dengan masih belum dikeluarkannya beberapa Peraturan Gubernur yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah. Fraksi PKS meminta agar OPD terkait segera menyelesaikannya sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat segera diaplikasikan di lapangan	Biro Hukum akan segera melakukan koordinasi dengan OPD pemrakarsa untuk menindaklanjuti amanat untuk membentuk peraturan pelaksanaan sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD
Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	TIDAK ADA		
2.			
3.			

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;

2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional dan provinsi, antara lain :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1.	Penghargaan Apresiasi Kementerian Hukum dan HAM (Tingkat Nasional) Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	Kementerian Hukum dan HAM	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, 13 April 2022
2.	Penghargaan Tingkat Provinsi (Pojok Baca dan Perpustakaan)	Gubernur Sumatera Barat	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	10 Oktober 2022

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan;

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

NIHIL

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal yang merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

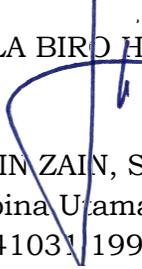
Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

KEPALA BIRD HUKUM


EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031199803 1 004